

PENGUATAN EKOSISTEM DIGITAL BERBASIS WILAYAH

Layanan Wifi Publik Dongkrak Iklim Kreatif

YOGYA (KR) - Layanan wifi publik yang difasilitasi oleh pemerintah harus mampu dimanfaatkan secara luas. Tidak sebatas mengakomodir kebutuhan data internet dalam memainkan gawai melainkan dapat mendongkrak tumbuhnya iklim kreatif di tiap wilayah.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfosan) Kota Yogya Tri Hastono, menyebut sedikitnya terdapat 356 titik wifi publik yang tersebar di tiap wilayah. Setiap tahun titik lokasinya juga terus ditambah hingga setiap sudut kota dapat tersambung internet. "Secara bertahap semua RW akan kita fasilitasi. Bagi yang sudah terpasang, kami dorong untuk dapat digunakan secara produktif," sebutnya di sela pelatihan penguatan ekosistem digital berbasis wilayah di Kampung Taman Patehan Kraton, Kamis (11/6).

hadirkan kalangan profesional guna membuka wawasan yang lebih luas kepada masyarakat selaku pengguna internet di wilayah. Harapannya, layanan internet gratis yang disediakan pemerintah tersebut tidak sebatas untuk aktivitas di media sosial melainkan kegiatan digital yang mampu mendukung produktivitas masyarakat.

Tri Hastono menjabarkan, keberadaan wifi publik bisa menjadi titik awal membangun ekosistem digital. Diawali dari proses pembelajaran daring yang mampu terbantu oleh layanan wifi publik. Selanjutnya pun dapat diman-

faatkan pula dalam memperluas jaringan promosi usaha yang digeluti masyarakat. Seiring dengan itu, dunia fotografi maupun perfilman sebagai salah satu bidang ekonomi kreatif juga dapat dikembangkan. "Iklim kreativitas yang dibangun tidak sebatas aktivitas ekonomi melainkan juga sosial dan budaya. Sehingga bagaimana kampung menjadi aktif dengan memanfaatkan wifi publik," jabarnya.

Dicontohkannya pelaku usaha mikro kecil bisa memotret hasil produknya kemudian diunggah ke marketplace dengan bantuan wifi publik. Selain itu perjalanan kampung dapat direkam dan didokumentasikan melalui perangkat telepon pintar. Seluruh aktivitas yang ada di wilayah pun dapat dengan mudah didigitalisasi dan diketahui oleh khalayak tanpa terbatas waktu

dan tempat.

"Untuk membangun ekosistem ini kita bisa kedepankan konsep pentahelix atau multipihak. Misal dunia kampus akan kita datangkan untuk kurasi atau profesional untuk memberi pendampingan cara menghasilkan foto atau video yang bagus hanya dengan handphone. Jadi potensi digital bisa mengubah yang dulu tidak berharga kemudian menjadi bernilai hanya karena viral," papar Tri Hastono.

Anggota Komisi B DPRD Kota Yogya Rifki Listianto, menyebut wifi publik mampu memberikan manfaat positif selama pandemi. Dirinya pun mendorong agar masyarakat memanfaatkan secara lebih produktif. Tidak sebatas untuk aktivitas berselancar media sosial melainkan juga mengunggah produk usahanya.

Senada juga disampaikan



KR-Ardhi Wahdan

Kepala Diskominfosan Kota Yogya (kanan) menyampaikan pengarahannya dalam pelatihan penguatan ekosistem digital berbasis wilayah di Kampung Taman.

kan Lurah Patehan Kraton Handani. Menurutnya, sebelumnya warga sudah memiliki kesadaran untuk memperbaiki taraf hidup. Dengan adanya jaringan internet gratis maka upaya tersebut dapat dire-

alisasikan lebih cepat. Sehingga ekosistem digital berbasis wilayah memang harus diperkuat. (Dhi)-f

KETERBATASAN ANGGARAN JADI KENDALA

2021, Ditarget Terbentuk 1.200 Jaga Warga

YOGYA (KR) - Pemda DIY terus berupaya melakukan pendampingan kepada Satuan tugas (Satgas) Padukuhan alias Jaga Warga yang ditargetkan bisa terbentuk sebanyak 1.200 kelompok hingga akhir 2021. Sebab, Satgas Padukuhan di DIY yang terbentuk belum mencapai 50 persen karena keterbatasan atau minimnya anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 dari APBDDes.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY Noviar Rahmad mengatakan, pihaknya mendorong dan melakukan pendampingan kepada 84 kelompok Jaga Warga yang ada di bawah koordinasi Satpol PP DIY. Hingga akhir tahun ini ditargetkan terbentuk 1.200 kelompok Jaga Warga.

"Jaga Warga levelnya tingkat Padukuhan, kecuali di Kota Yogyakarta yang levelnya Kampung dan Kelurahan Wates Kulonprogo berada di tingkat RW. Jadi, kami mendorong dari Jaga Warga ini segera membentuk posko-posko di tingkat Padukuhan yang saat ini masih belum mencapai 50 persen," paparnya di Gedhong Pracimosono Kepatihan, Jumat (11/6). Noviar menyampaikan, Satpol PP DIY telah memberikan pendampingan kelompok Jaga Warga di Gu-

nungkidul, Bantul serta sebagian di Sleman dan Kulonprogo. Sehingga pihaknya belum menuntaskan pendampingan dan pembentukan Jaga Warga di seluruh Kabupaten/Kota yang ada di DIY. Kendalanya adalah faktor kecilnya biaya karena adanya focusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 di tingkat desa hanya sebesar 8 persen dari APBDDes.

"Bisa dibayangkan jika APBDDesnya hanya Rp 1 miliar maka anggaran penanganannya hanya Rp 80 juta dalam jangka waktu satu tahun yang dibagi 12 bulan untuk penanganan, pembinaan, biaya shelter dan sebagainya. Jadi anggarannya sangat tidak ideal itulah kendalanya, karena Jaga Warga ini adalah partisipasi masyarakat maka kami mendorong partisipasi masyarakat untuk anggaran fasilitas yang kita harapkan," terangnya.

Sementara itu Kepala Kesbangpol DIY, Dewa Isnuro Broto menyatakan, meningkatnya jumlah kasus dan klaster baru dalam beberapa waktu terakhir membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak. Dengan adanya penyebaran yang semakin banyak dan masif serta penularannya sudah di forum kegiatan masya-

rakat seperti hajatan, kedisiplinan penegakkan Prokes perlu lebih ditekankan.

"Keberadaan Jaga Warga, Linmas atau Satgas dilevel RT/RW perlu lebih dioptimalkan lagi. Untuk itu pemerintah desa harus mencoba melakukan pembiayaan terhadap konsekuensi dari kegiatan yang dilakukan di Satgas Covid ditingkat desa. Adapun untuk pembiayaannya atau alokasi anggarannya bisa menggunakan APBDDes," kata Dewa Isnuro Broto.

Dewa mengatakan, guna mengantisipasi adanya penambahan kasus atau klaster baru, idealnya pemerintah desa sudah mulai mengetatkan lagi kebijakan terkait protokol Covid serta monitoring dan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat. Konsekuensi dari itu pengaturan cara itu kegiatan hajatan akan lebih diperketat. Dengan adanya pengetatan itu diharapkan terjadinya kerumunan yang bisa memicu terjadinya penularan akan bisa ditekan.

"Covid-19 itu benar-benar ada, jadi masyarakat harus menegakkan Prokes dalam setiap aktivitasnya. Karena hanya dengan cara itu penularan kasus bisa dicegah," ujarnya. (Ira/Ria)-f

TIDAK DITEMUKAN KLASTER BARU

Tambahan Kasus Covid-19 Didominasi Keluarga

YOGYA (KR) - Selama empat hari terakhir laju penambahan kasus Covid-19 di Kota Yogya rata-rata tercatat di atas 30 kasus per hari. Bahkan pada Kamis (10/6) dilaporkan ada tambahan 89 kasus. Meski demikian tidak ditemukan klaster baru, dan tambahan kasus tersebut didominasi dari keluarga.

"Kebanyakan memang di dalam keluarga, kelompok atau komunitas dan tersebar di wilayah. Misal satu anggota keluarga kena, setelah ditracing yang lain juga kena," jelas Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Yogya Heroe Poerwadi, Jumat (11/6).

Terkait tingginya angka tambahan pada Kamis (10/6) lalu, menurut Heroe merupakan efek dari keterlambatan laporan sejak empat hari sebelumnya. Hal ini karena tidak semua kasus yang terjadi selama empat hari tersebut dapat dilaporkan pada hari yang sama. Penyebab keterlambatan bisa dari pihak laboratorium atau sebab lain namun bukan karena lonjakan dalam satu hari.

Heroe menjelaskan, meski ada kenaikan namun tidak sampai masuk kategori lonjakan. Di samping itu juga bukan karena

efek libur lebaran melainkan peningkatan aktivitas pada akhir pekan beberapa waktu lalu. "Kami masih mengidentifikasi sebagai transmisi lokal karena banyak dari lingkungan keluarga. Total kasus aktif kemarin tercatat 361 kasus, baik yang isolasi mandiri maupun di rumah sakit. Kapasitas di rumah sakit juga masih aman, sekitar 50 persen," urainya.

Kemungkinan adanya klaster di Kota Yogya juga tidak ditemukan. Terakhir ialah dua pekan lalu di salah satu wilayah Kemantren Umbulharjo yang terjadi lonjakan dari klaster layatan. Totalnya di wilayah tersebut mencapai 63 kasus hingga sempat dilakukan pembatasan mikro atau *lockdown*. Akan tetapi sejak pekan lalu sudah terkendali.

Sedangkan dari mortalitas kasus di Kota Yogya cenderung merata dari yang muda hingga lansia. Artinya, sebagian besar ditentukan oleh daya tahan tubuhnya masing-masing. Tidak sedikit anak muda tidak memiliki komorbid namun terkena virus Korona karena daya tahan tubuhnya sedang tidak fit. Kendati demikian, warga yang sudah divaksin cenderung lebih tahan dibanding yang belum. (Dhi)-f

BERJUANG SEJAK 2004

Pionir Psikolog Klinis DIY Minta Diangkat PNS

YOGYA (KR) - Sejumlah tenaga kesehatan psikologis yang sehari-hari bertugas di Puskesmas di Sleman menuntut segera diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Pasalnya, mereka telah mengabdikan selama belasan tahun dengan status sebagai pegawai kontrak. Padahal, mereka menjadi pelayanan kesehatan psikologis klinis pertama di Indonesia yang bertugas di Puskesmas.

Perjuangan mereka sejak 2004 lalu, seakan tidak ada artinya. Lantaran usia mereka telah lewat ketika ingin ikut seleksi CPNS. Keberadaan psikologis klinis ini pertama kali diinisiasi oleh Fakultas Psikologi UGM dan membuat Kabupaten Sleman mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat, yaitu Ksatria Bhakti Husada 2014 lalu.

"Selama 17 tahun teman-teman ini berjuang di bidang kesehatan jiwa. Dan setiap tahun pula mereka harus tanda tangan perpanjangan kontrak," kata Ketua Ikatan Psikologi Klinis (IPK) DIY Siti Urbayutun saat audiensi ke DPRD DIY, Jumat (11/6). Keberadaan mereka ini adalah yang pertama. Bahkan di Indonesia akan menjadi

percontohan. Selain ini di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul mulai merintis program yang sama.

Amalia, salah satu psikolog klinis di Puskesmas Ngaglik 2 Sleman menjelaskan, kedatangan mereka ini tidak lain untuk meminta bantuan DPRD DIY agar diperjuangkan nasib mereka. Salah satunya dengan dapat diterbitkan Keppres tentang pengangkatan tenaga psikolog klinis dengan batas usia maksimal 40 tahun.

"Saat ini aturan usia yang boleh mendaftar sebagai CPNS maksimal 35 tahun. Sedangkan dari 25 tenaga psikolog klinis di Sleman, 16 orang berusia di atas 35 tahun sedangkan sisanya di bawahnya," katanya.

Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudianta memberikan apresiasi kepada tenaga psikolog klinis tersebut. DPRD DIY siap memfasilitasi mereka untuk bertemu langsung dengan pemerintah pusat. Karena kewenangan mengangkat PNS ada di pusat. "Kami juga akan berupaya, agar teman-teman ini dapat audiensi dengan wakil rakyat di DPR RI. Ini adalah upaya maksimal kami dalam memperjuangkan hak rekan-rekan," ungkapnya. (Awh/Bro)-f

BERI JAMINAN AKUNTABILITAS KONSUMEN

Pemkot Siapkan Aturan Pemeriksaan GeNose

YOGYA (KR) - Pemkot Yogya dalam waktu dekat akan menerbitkan aturan baru terkait pemeriksaan cepat untuk antisipasi Covid-19. Salah satunya yang menggunakan GeNose guna menjamin akuntabilitas konsumen. Walikota Yogya Haryadi Suyuti mengatakan layanan pemeriksaan Covid-19 harus akuntabel dan memberikan hasil pemeriksaan yang valid.

"Identitas kesehatan yang menyatakan negatif Covid-19 sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Sehingga harus benar-be-

nar akuntabel," katanya, Jumat (11/6).

Oleh karena itu pihaknya mewanakan jika pemeriksaan Covid-19 menggunakan GeNose menunjukkan hasil positif namun setelah ditindaklanjuti dengan jenis pemeriksaan lain menunjukkan hasil negatif maka pelanggan berhak memperoleh pengembalian biaya pemeriksaan GeNose. "Tujuannya bukan meminta uangnya kembali karena hasil tidak valid, tetapi masyarakat tidak boleh dibebani biaya atas hasil pemeriksaan yang tidak

valid," tandasnya.

Selain itu Haryadi mengemukakan, nantinya dalam pemeriksaan menggunakan GeNose perlu disertakan syarat pelayanan yang lebih tegas. Salah satunya berupa surat pernyataan warga yang melakukan pemeriksaan telah memenuhi syarat tidak makan dan minum selama satu jam sebelum pemeriksaan, tidak merokok, tidak memakai parfum berlebihan, dan mematuhi aturan lainnya. Hal ini agar calon konsumen mengetahui persyaratan secara bahu sehingga mampu berlaku tertib dan bertanggung jawab.

Haryadi berharap wacana tersebut bisa segera direalisasikan dengan penerbitan aturan pendu-

kungnya. Sebelumnya, dirinya telah meminta seluruh institusi yang menyelenggarakan pemeriksaan Covid-19 agar menyediakan tempat isolasi sementara bagi warga yang hasilnya terindikasi positif. "Tujuannya supaya warga tidak merasa kebingungan dan tidak melakukan mobilitas yang dikawatirkan justru berisiko menularkan ke orang lain," tandas Haryadi.

Saat ini, wilayah-wilayah Kota Yogya dipastikan tanpa zona merah atau zona risiko tinggi penularan Covid-19 berdasarkan PP-KM mikro. Meski demikian, masyarakat diharapkan mampu bahu membahu menjaga agar penularan kasus tidak semakin meluas. (Dhi)-f

385 Badan Publik Ikuti Monev

YOGYA (KR) - Mendorong percepatan dan peningkatan kualitas Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik di DIY, sebanyak 385 Badan Publik ikutsertakan dalam monitoring dan evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik tahun 2021.

"Dikelompokkan dalam beberapa kategori (cluster) se-DIY yaitu pemerintah kabupaten/kota, OPD Pemerintah Daerah DIY, OPD pemerintah kabupaten/kota, badan non struktural, OPD kapanewon/kemantren, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, instansi vertikal, partai politik, Badan Usaha Milik Daerah," tutur Ketua Monev Sri Surani SP kepada wartawan, Jumat (11/6) di Kantor Dinas Kominfo DIY.

Didampingi Wakil Ketua Komisi Informasi Daerah (KID) DIY Agus Purwanto SKM, Sekretaris Monev Ernati SIP MH dan Komisioner KID DIY Ir Rudy Nurhandoko, Sri menyebutkan KID DIY bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang konsens pada Isu Keterbukaan Informasi Publik.

"Monev 2021 dilaksanakan dalam 2 kegiatan, Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik dan Penentuan Juara 1-3 untuk tiap kategori. Sebanyak 357 badan publik (92,73%) sudah registrasi," jelasnya. (Vin)-f

PT TANI MURNI JOGJA

Berdomisili di Kabupaten Sleman

PENGUMUMAN TENTANG PENGGABUNGAN USAHA

Direksi PT TANI MURNI JOGJA (Perseroan Terbatas), yang berdomisili di Jalan Kaliurang KM 18 Padasan, Duwetsari, Pakembinangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta, dengan ini mengumumkan rencana penggabungan usaha dengan PT Tani Murni Indonesia yang berdomisili di Jalan Pasir Kaliki No 114 Bandung.

Bagi Pihak Ketiga yang merasa keberatan dengan rencana penggabungan usaha ini diberikan waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pengumuman ini untuk mengajukan keberatannya secara tertulis bersama dengan bukti yang sah kepada Direksi Perseroan ke alamat berikut:

PT TANI MURNI JOGJA

Jalan Kaliurang KM 18 Padasan, Duwetsari, Pakembinangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta

Sleman, 10 Juni 2021

Direksi

PT TANI MURNI JOGJA



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
AKADEMI KOMUNITAS NEGERI SENI DAN BUDAYA YOGYAKARTA
Jalan Parangtritis KM 4.5, Sewon, Bantul, D.I Yogyakarta

MENERIMA MAHASISWA BARU PROGRAM DIPLOMA SATU (D1) TA 2021/ 2022

PROGRAM STUDI

- D1 KARAWITAN
- D1 KRIYA KULIT
- D1 TARI

WAKTU PENDAFTARAN

- GELOMBANG II :
02 Juni - 02 Juli 2021
- Waktu Layanan Pendaftaran:
Senin - Kamis : Pukul 08.00 s.d. 14.30 WIB
Jumat : Pukul 08.00 s.d. 13.00 WIB
- Tempat Pendaftaran :
Kampus Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta
Jalan Parangtritis Km.4.5, Pnggungharjo, Sewon, Bantul

SYARAT PENDAFTARAN

- Mempunyai minat/ bakat di bidang Seni Tari, Karawitan dan, Kriya
- KTP DIY
- SMA/ Sederajat
- Usia tidak dibatasi
- Foto copy kartu identitas
- Pas foto 3x4 background merah (4 lembar dan softcopy)
- Foto copy STTB/ Ijazah/ SKHUN yang dilegalisir

BIAYA KULIAH SEPENUHNYA
DITANGGUNG OLEH PEMDA DIY